



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 61 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN  
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengelokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa maka peraturan Bupati batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian setiap desa dan penyaluran dana desa tahun 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
  13. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);

14. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 61); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa sebesar 168.403.538.000,-(seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 20%, (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat

- bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40%, (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
- c. Tahap III sebesar 40%, (empat puluh perseratus) dilaksanakan paling cepat bulan Juli.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan:

a. Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

1. Tahap I 20% ( dua puluh perseratus):

a) Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

- 1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
- 2) RKP Desa;
- 3) APBDesa tahun berjalan;
- 4) Foto copy RKD;
- 5) Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40%,40%
- 6) Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
- 7) Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan;
- 8) Foto kegiatan 0 % (nol perseratus);
- 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;

10) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.

b) Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.

c) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d) Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:

- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
- b. Foto copy RKD;
- c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%,40%,40%;

- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup;
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup.
- e) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan:
- a. Foto copy RKD;
  - b. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40%, 40%;
  - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.

2. Tahap II 40% (empat puluh persertus) :

Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan Tahap II, kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I;
- b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
- c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40%, 40%;
- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup
- f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.

(2) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I;
- b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
- c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%,40%, 40%;
- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa bermeterai

cukup;

- f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup.

(3) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

- a. Penggunaan Dana Desa Tahap I;
- b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I);
- c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40%, 40%;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II bermaterai cukup;
- e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup;
- f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.

3. Tahap III 40% :

Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan Tahap III, kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :

- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II;
- b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap II);
- c. Rencana dana pengeluaran dana Desa 100%, 20%,40%,40%;
- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap III bermeterai cukup;
- f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa bermeterai cukup; dan
- g. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

(4) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap III yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II;
- b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap II);
- c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40%, 40%;

- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
  - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup.
- (5) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap III ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- 1. Penggunaan Dana Desa Tahap III;
  - 2. Foto copy RKD;
  - 3. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40%, 40%;
  - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup;
  - 5. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup;
  - 6. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Kepala Desa dengan dikordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa Tahap I , Tahap II dan Tahap III kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan capaian output penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat Minggu Keempat bulan Juni Tahun berjalan; dan
  - c. Tahap III paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

5. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 22 Januari 2018  
**BUPATI BATANG,**

ttd

**WIHAJI**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS Jaelani Mursidi, SH., M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN  
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DANA DESA UNTUK DESA SE KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	<b>KEC. WONOTUNGGAL</b>				
1	SILURAH	1,106,369,000	221,273,800	442,547,600	442,547,600
2	SODONG	673,323,000	134,664,600	269,329,200	269,329,200
3	GRINGGINGSARI	673,761,000	134,752,200	269,504,400	269,504,400
4	KEDUNGMALANG	716,283,000	143,256,600	286,513,200	286,513,200
5	SENDANG	661,353,000	132,270,600	264,541,200	264,541,200
6	WONOTUNGGAL	684,097,000	136,819,400	273,638,800	273,638,800
7	BROKOH	654,565,000	130,913,000	261,826,000	261,826,000
8	WATES	657,354,000	131,470,800	262,941,600	262,941,600
9	BRAYO	654,747,000	130,949,400	261,898,800	261,898,800
10	KEMLIGI	645,209,000	129,041,800	258,083,600	258,083,600
11	SIGAYAM	655,180,000	131,036,000	262,072,000	262,072,000
12	KREYO	661,161,000	132,232,200	264,464,400	264,464,400
13	SIWATU	666,922,000	133,384,400	266,768,800	266,768,800
14	DRINGO	666,848,000	133,369,600	266,739,200	266,739,200
15	PENANGKAN	661,029,000	132,205,800	264,411,600	264,411,600
	<b>TOTAL</b>	<b>10,438,201,000</b>	<b>2,087,640,200</b>	<b>4,175,280,400</b>	<b>4,175,280,400</b>
II	<b>KEC. BANDAR</b>				
1	TOMBO	988,539,000	197,707,800	395,415,600	395,415,600
2	WONOMERTO	715,672,000	143,134,400	286,268,800	286,268,800
3	WONODADI	704,197,000	140,839,400	281,678,800	281,678,800
4	PESALAKAN	696,286,000	139,257,200	278,514,400	278,514,400
5	BINANGUN	776,100,000	155,220,000	310,440,000	310,440,000
6	SIDAYU	700,020,000	140,004,000	280,008,000	280,008,000
7	TOSO	955,924,000	191,184,800	382,369,600	382,369,600
8	KLUWIH	925,418,000	185,083,600	370,167,200	370,167,200
9	WONOKERTO	712,077,000	142,415,400	284,830,800	284,830,800
10	BANDAR	646,051,000	129,210,200	258,420,400	258,420,400
11	TUMBREP	818,438,000	163,687,600	327,375,200	327,375,200
12	TAMBAHREJO	770,693,000	154,138,600	308,277,200	308,277,200
13	PUNCANGGADING	683,506,000	136,701,200	273,402,400	273,402,400
14	CANDI	937,866,000	187,573,200	375,146,400	375,146,400
15	WONOSEGORO	664,185,000	132,837,000	265,674,000	265,674,000
16	SIMPAR	662,976,000	132,595,200	265,190,400	265,190,400
17	BATIOMBO	675,164,000	135,032,800	270,065,600	270,065,600
	<b>TOTAL</b>	<b>13,033,112,000</b>	<b>2,606,622,400</b>	<b>5,213,244,800</b>	<b>5,213,244,800</b>
III	<b>KEC. BLADO</b>				
1	GERLANG	786,821,000	157,364,200	314,728,400	314,728,400
2	KALITENGAH	683,864,000	136,772,800	273,545,600	273,545,600
3	KEMBANGLANGIT	695,186,000	139,037,200	278,074,400	278,074,400
4	GONDANG	699,450,000	139,890,000	279,780,000	279,780,000
5	BISMO	675,927,000	135,185,400	270,370,800	270,370,800
6	KETELENG	711,764,000	142,352,800	284,705,600	284,705,600
7	KALISARI	679,418,000	135,883,600	271,767,200	271,767,200
8	BESANI	977,901,000	195,580,200	391,160,400	391,160,400
9	WONOBODRO	961,696,000	192,339,200	384,678,400	384,678,400
10	BAWANG	683,101,000	136,620,200	273,240,400	273,240,400
11	PESANTREN	916,650,000	183,330,000	366,660,000	366,660,000
12	KAMBANGAN	726,110,000	145,222,000	290,444,000	290,444,000
13	KEPUTON	718,712,000	143,742,400	287,484,800	287,484,800
14	BLADO	695,997,000	139,199,400	278,398,800	278,398,800
15	COKRO	690,441,000	138,088,200	276,176,400	276,176,400
16	SELOPAJANG BARAT	702,537,000	140,507,400	281,014,800	281,014,800

VII	KEC. GRINGSING				
1	SURODADI	650,769,000	130,153,800	260,307,600	260,307,600
2	SENTUL	665,751,000	133,150,200	266,300,400	266,300,400
3	PLELEN	664,454,000	132,890,800	265,781,600	265,781,600
4	KUTOSARI	668,181,000	133,636,200	267,272,400	267,272,400
5	MENTOSARI	680,873,000	136,174,600	272,349,200	272,349,200
6	GRINGSING	647,734,000	129,546,800	259,093,600	259,093,600
7	YOSOREJO	684,164,000	136,832,800	273,665,600	273,665,600
8	KRENGSENG	678,148,000	135,629,600	271,259,200	271,259,200
9	SAWANGAN	733,391,000	146,678,200	293,356,400	293,356,400
10	KETANGGAN	697,076,000	139,415,200	278,830,400	278,830,400
11	LEBO	668,079,000	133,615,800	267,231,600	267,231,600
12	KEBONDALEM	670,111,000	134,022,200	268,044,400	268,044,400
13	SIDOREJO	665,629,000	133,125,800	266,251,600	266,251,600
14	TEDUNAN	674,158,000	134,831,600	269,663,200	269,663,200
15	MADUGOWONGJATI	687,254,000	137,450,800	274,901,600	274,901,600
	<i>TOTAL</i>	10,135,772,000	2,027,154,400	4,054,308,800	4,054,308,800
VIII	KEC. LIMPUNG				
1	NGALIYAN	663,068,000	132,613,600	265,227,200	265,227,200
2	SUKOREJO	702,154,000	140,430,800	280,861,600	280,861,600
3	TEMBOK	693,164,000	138,632,800	277,265,600	277,265,600
4	DONOREJO	659,508,000	131,901,600	263,803,200	263,803,200
5	SIDOMULYO	667,481,000	133,496,200	266,992,400	266,992,400
6	KALISALAK	680,574,000	136,114,800	272,229,600	272,229,600
7	LIMPUNG	659,994,000	131,998,800	263,997,600	263,997,600
8	KEPUH	654,908,000	130,981,600	261,963,200	261,963,200
9	SEMPU	649,554,000	129,910,800	259,821,600	259,821,600
10	BABADAN	654,668,000	130,933,600	261,867,200	261,867,200
11	PLUMBON	646,910,000	129,382,000	258,764,000	258,764,000
12	AMONGROGO	659,504,000	131,900,800	263,801,600	263,801,600
13	DLISEN	680,083,000	136,016,600	272,033,200	272,033,200
15	ROWOSARI	672,108,000	134,421,600	268,843,200	268,843,200
16	PUNGANGAN	660,361,000	132,072,200	264,144,400	264,144,400
17	LOBANG	676,267,000	135,253,400	270,506,800	270,506,800
18	WONOKERSO	674,989,000	134,997,800	269,995,600	269,995,600
	<i>TOTAL</i>	11,355,295,000	2,271,059,000	4,542,118,000	4,542,118,000
IX	KEC. BANYUPUTIH				
1	BANYUPUTIH	675,414,000	135,082,800	270,165,600	270,165,600
2	KALIBALIK	672,032,000	134,406,400	268,812,800	268,812,800
3	SEMBUNG	681,644,000	136,328,800	272,657,600	272,657,600
4	KEDAWUNG	707,431,000	141,486,200	282,972,400	282,972,400
5	DLIMAS	653,797,000	130,759,400	261,518,800	261,518,800
6	LUWUNG	670,931,000	134,186,200	268,372,400	268,372,400
8	PENUNDAN	650,938,000	130,187,600	260,375,200	260,375,200
9	BANARAN	656,831,000	131,366,200	262,732,400	262,732,400
10	TIMBANG	655,900,000	131,180,000	262,360,000	262,360,000
11	BULU	665,871,000	133,174,200	266,348,400	266,348,400
12	KALANGSONO	660,281,000	132,056,200	264,112,400	264,112,400
	<i>TOTAL</i>	7,351,070,000	1,470,214,000	2,940,428,000	2,940,428,000
X	KEC. SUBAH				
1	MENJANGAN	693,600,000	138,720,000	277,440,000	277,440,000
2	KARANGTENGAH	712,097,000	142,419,400	284,838,800	284,838,800
3	MANGUNHARJO	663,584,000	132,716,800	265,433,600	265,433,600
4	TENGGULANGHARJO	660,273,000	132,054,600	264,109,200	264,109,200
5	KALIMANGGIS	728,645,000	145,729,000	291,458,000	291,458,000
6	KEBORANGAN	651,059,000	130,211,800	260,423,600	260,423,600
7	JATISARI	680,704,000	136,140,800	272,281,600	272,281,600
8	SUBAH	654,101,000	130,820,200	261,640,400	261,640,400
9	KUMEJING	649,120,000	129,824,000	259,648,000	259,648,000
10	DURENOMBO	693,485,000	138,697,000	277,394,000	277,394,000
11	CLAPAR	645,560,000	129,112,000	258,224,000	258,224,000
12	ADINUSO	687,577,000	137,515,400	275,030,800	275,030,800
13	SENGON	693,195,000	138,639,000	277,278,000	277,278,000
14	GONDANG	722,455,000	144,491,000	288,982,000	288,982,000
15	KURIPAN	701,542,000	140,308,400	280,616,800	280,616,800
16	KEMIRI BARAT	685,816,000	137,163,200	274,326,400	274,326,400
17	KEMIRI TIMUR	719,260,000	143,852,000	287,704,000	287,704,000
	<i>TOTAL</i>	11,642,073,000	2,328,414,600	4,656,829,200	4,656,829,200

XI	KEC. PECALUNGAN				
1	PECALUNGAN	661,269,000	132,253,800	264,507,600	264,507,600
2	BANDUNG	710,078,000	142,015,600	284,031,200	284,031,200
3	GOMBONG	712,574,000	142,514,800	285,029,600	285,029,600
4	RANDU	689,340,000	137,868,000	275,736,000	275,736,000
5	SIGUCI	678,389,000	135,677,800	271,355,600	271,355,600
6	PRETEK	1,020,983,000	204,196,600	408,393,200	408,393,200
7	SELOKARTO	760,824,000	152,164,800	304,329,600	304,329,600
8	GEMUH	940,226,000	188,045,200	376,090,400	376,090,400
9	GUMAWANG	717,306,000	143,461,200	286,922,400	286,922,400
10	KENITEN	663,337,000	132,667,400	265,334,800	265,334,800
	TOTAL	7,554,326,000	1,510,865,200	3,021,730,400	3,021,730,400
XII	KEC. TULIS				
1	WRINGINGINTUNG	719,624,000	143,924,800	287,849,600	287,849,600
2	SEMBOJO	650,823,000	130,164,600	260,329,200	260,329,200
3	POSONG	654,964,000	130,992,800	261,985,600	261,985,600
4	KALIBOYO	639,057,000	127,811,400	255,622,800	255,622,800
5	SIMBANGDESA	647,328,000	129,465,600	258,931,200	258,931,200
6	BEJI	660,329,000	132,065,800	264,131,600	264,131,600
7	TULIS	718,940,000	143,788,000	287,576,000	287,576,000
8	SIMBANGJATI	657,888,000	131,577,600	263,155,200	263,155,200
9	KEDUNGGEGOG	694,916,000	138,983,200	277,966,400	277,966,400
10	KENCONOREJO	667,403,000	133,480,600	266,961,200	266,961,200
11	PONOWARENG	663,586,000	132,717,200	265,434,400	265,434,400
12	SIBERUK	648,129,000	129,625,800	259,251,600	259,251,600
13	KEBUMEN	665,902,000	133,180,400	266,360,800	266,360,800
14	CLUWUK	650,979,000	130,195,800	260,391,600	260,391,600
15	JRAKAHPAYUNG	675,678,000	135,135,600	270,271,200	270,271,200
16	JOLOSEKTI	668,647,000	133,729,400	267,458,800	267,458,800
17	MANGGIS	662,181,000	132,436,200	264,872,400	264,872,400
	TOTAL	11,346,374,000	2,269,274,800	4,538,549,600	4,538,549,600
XIII	KEC. KANDEMAN				
1	TEGALSARI	705,012,000	141,002,400	282,004,800	282,004,800
2	KANDEMAN	696,131,000	139,226,200	278,452,400	278,452,400
3	BAKALAN	660,052,000	132,010,400	264,020,800	264,020,800
4	LAWANGAJI	645,353,000	129,070,600	258,141,200	258,141,200
5	DEPOK	730,941,000	146,188,200	292,376,400	292,376,400
6	TRAGUNG	659,120,000	131,824,000	263,648,000	263,648,000
7	CEMPERENG	661,810,000	132,362,000	264,724,000	264,724,000
8	KARANGANOM	661,925,000	132,385,000	264,770,000	264,770,000
9	WONOKERSO	672,720,000	134,544,000	269,088,000	269,088,000
10	UJUNGNEGORO	747,637,000	149,527,400	299,054,800	299,054,800
11	KARANGGENENG	673,751,000	134,750,200	269,500,400	269,500,400
12	JURAGAN	737,336,000	147,467,200	294,934,400	294,934,400
13	BOTOLAMBAT	710,734,000	142,146,800	284,293,600	284,293,600
	TOTAL	8,962,522,000	1,792,504,400	3,585,008,800	3,585,008,800
XIV	KEC. BATANG				
1	ROWOBELANG	751,164,000	150,232,800	300,465,600	300,465,600
2	CEPOKOKUNING	648,253,000	129,650,600	259,301,200	259,301,200
3	PASEKARAN	701,840,000	140,368,000	280,736,000	280,736,000
4	KALISALAK	686,783,000	137,356,600	274,713,200	274,713,200
5	KECEPAK	708,598,000	141,719,600	283,439,200	283,439,200
6	KLIDANG WETAN	660,586,000	132,117,200	264,234,400	264,234,400
7	KLIDANG LOR	658,877,000	131,775,400	263,550,800	263,550,800
8	KALIPUCANG WETAN	702,107,000	140,421,400	280,842,800	280,842,800
9	KALIPUCANG KULON	746,146,000	149,229,200	298,458,400	298,458,400
10	KARANGANYAR	671,210,000	134,242,000	268,484,000	268,484,000
11	DENASRI KULON	724,267,000	144,853,400	289,706,800	289,706,800
12	DENASRI WETAN	689,296,000	137,859,200	275,718,400	275,718,400
	TOTAL	8,349,127,000	1,669,825,400	3,339,650,800	3,339,650,800
XV	KEC. WARUNGASEM				
1	PANDANSARI	648,311,000	129,662,200	259,324,400	259,324,400
2	KALIWARENG	731,242,000	146,248,400	292,496,800	292,496,800
3	PEJAMBON	649,882,000	129,976,400	259,952,800	259,952,800
4	SARIGLAGAH	666,111,000	133,222,200	266,444,400	266,444,400
5	PESAREN	648,513,000	129,702,600	259,405,200	259,405,200
6	SIDOREJO	709,525,000	141,905,000	283,810,000	283,810,000
7	CEPAGAN	743,874,000	148,774,800	297,549,600	297,549,600

8	MASIN	695,273,000	139,054,600	278,109,200	278,109,200
9	BANJIRAN	752,162,000	150,432,400	300,864,800	300,864,800
10	WARUNGASEM	679,819,000	135,963,800	271,927,600	271,927,600
11	GAPURO	644,806,000	128,961,200	257,922,400	257,922,400
12	KALIBELUK	659,176,000	131,835,200	263,670,400	263,670,400
13	SAWAHJOHO	663,120,000	132,624,000	265,248,000	265,248,000
14	CANDIARENG	666,938,000	133,387,600	266,775,200	266,775,200
15	LEBO	667,443,000	133,488,600	266,977,200	266,977,200
16	MENGUNENG	655,765,000	131,153,000	262,306,000	262,306,000
17	TERBAN	648,185,000	129,637,000	259,274,000	259,274,000
18	SIJONO	677,013,000	135,402,600	270,805,200	270,805,200
	<b>TOTAL</b>	<b>12,207,158,000</b>	<b>2,441,431,600</b>	<b>4,882,863,200</b>	<b>4,882,863,200</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>168,403,538,000</b>	<b>33,680,707,600</b>	<b>67,361,415,200</b>	<b>67,361,415,200</b>

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

8	MASIN	695,273,000	139,054,600	278,109,200	278,109,200
9	BANJIRAN	752,162,000	150,432,400	300,864,800	300,864,800
10	WARUNGASEM	679,819,000	135,963,800	271,927,600	271,927,600
11	GAPURO	644,806,000	128,961,200	257,922,400	257,922,400
12	KALIBELUK	659,176,000	131,835,200	263,670,400	263,670,400
13	SAWAHJOHO	663,120,000	132,624,000	265,248,000	265,248,000
14	CANDIARENG	666,938,000	133,387,600	266,775,200	266,775,200
15	LEBO	667,443,000	133,488,600	266,977,200	266,977,200
16	MENGUNENG	655,765,000	131,153,000	262,306,000	262,306,000
17	TERBAN	648,185,000	129,637,000	259,274,000	259,274,000
18	SIJONO	677,013,000	135,402,600	270,805,200	270,805,200
	<b>TOTAL</b>	<b>12,207,158,000</b>	<b>2,441,431,600</b>	<b>4,882,863,200</b>	<b>4,882,863,200</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>168,403,538,000</b>	<b>33,680,707,600</b>	<b>67,361,415,200</b>	<b>67,361,415,200</b>

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI